

# Episode Baru Cicak vs Buaya

Oleh: Hendra Kurniawan

SEJAK Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hubungan antara KPK dengan Polri kembali memanas. Tentu kita ingat pada Juli 2009 untuk pertama kalinya muncul istilah cicak vs buaya yang menggambarkan perseteruan antara KPK dengan Polri. Analogi ini dicetuskan oleh Komjen Susno Duedji, Kabareskrim Mabes Polri, yang diduga terlibat dalam kasus Bank Century. Puncaknya terjadi ketika Bareskrim menahan dua Wakil Ketua KPK yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra Martha Hamzah.

Tiga tahun kemudian kasus cicak vs buaya kembali terjadi. Kasus ini dipicu oleh langkah KPK mengusut kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menjerat mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo. Pada 5 Oktober 2012, puluhan anggota Brimob mengepung gedung KPK dengan niat menangkap salah satu penyidik KPK, Komisaris Novel Baswedan yang dituduh terlibat aksi penganiayaan berat saat masih bertugas di Kepolisian Daerah Riau. Meski tidak mudah dan penuh penantian, Presiden SBY berhasil menjadi "wasit" untuk meredakan dua kali perseteruan ini.

Awal tahun 2015 ini, kisah cicak vs buaya menapaki episode baru. Setelah Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, Bareskrim Mabes Polri mendadak menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Alasan dari penangkapan itu terkait dengan kasus Pilkada Kotawaringin tahun 2010. Rangkaian aksi saling balas ini seolah menegaskan perseteruan KPK vs Polri yang sudah berkali-kali terjadi bagaimana bara dalam sekam. Terlihat damai namun sebe-

narnya api konflik itu tak pernah padam.

Menariknya dalam setiap episode cicak vs buaya, para pegiat anti-korupsi bersama masyarakat selalu setia memberi dukungan pada KPK. Kendati digoyang oleh isu yang sama, namun masyarakat tampak lebih menaruh kepercayaan pada KPK. Ini tanda bahwa ekspektasi masyarakat terhadap KPK jauh lebih besar ketimbang pada lembaga penegak hukum lainnya. Tentu bukan tanpa



kan blunder politik dalam menghadapi permasalahan ini. Masyarakat sampai saat ini masih menaruh harap agar Presiden Joko Widodo segera mengambil keputusan tegas untuk mendukung dan menguatkan KPK. Masyarakat tidak senang dengan upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menggembosi KPK. Atas komitmennya dalam pemberantasan korupsi, maka Presiden Joko Widodo sebaiknya segera menunjukkan pada publik

Ada baiknya berbagai pihak saat ini menahan diri dan ikhlas demi kebaikan bersama. Sikap Bambang Widjojanto yang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil ketua KPK patut diapresiasi. Sebagai penegak hukum, Bambang Widjojanto konsisten dan tunduk pada undang-undang dengan mengacu statusnya sebagai tersangka. Seyogyanya langkah bijak ini dapat ditiru oleh Komjen Budi Gunawan yang juga berstatus sebagai tersangka. Hal ini penting agar proses hukum segera berjalan. Presiden Joko Widodo juga dapat segera mengajukan nama calon baru untuk diangkat sebagai kapolri yang definitif.

alasan, sejak awal kelahirannya, KPK dianggap sebagai juru selamat yang mampu mendukung Polri dan Kejaksaan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, meskipun upaya bersih diri telah maksimal, namun apabila Polri dan Kejaksaan belum mampu meyakinkan masyarakat, maka stigma KPK sebagai lembaga super power akan sulit luruh.

Masyarakat juga merasakan kekecewaan atas sikap Presiden Joko Widodo yang terlihat justru melaku-

tindakan yang jelas dalam penyelesaian masalah ini.

Banyak pengamat yang menilai perseteruan antara KPK vs Polri sekarang jauh lebih parah dan membahayakan dibanding episode-episode sebelumnya. Memang bagaimanapun upaya penegakan hukum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik. Untuk itu diperlukan pemisahan yang jelas antara persoalan hukum dengan politik. Presiden Joko Widodo tentu

sadar bahwa dirinya memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatasi persoalan ini agar tidak kehilangan kepercayaan dari rakyat. Pembiaran justru akan menimbulkan konflik lebih tajam antara KPK dengan Polri yang dapat semakin menjerumuskan kedua institusi ini ke dalam penyalahgunaan wewenangnya masing-masing.

Ada baiknya berbagai pihak saat ini menahan diri dan ikhlas demi kebaikan bersama. Sikap Bambang Widjojanto yang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil ketua KPK patut diapresiasi. Sebagai penegak hukum, Bambang Widjojanto konsisten dan tunduk pada undang-undang dengan mengacu statusnya sebagai tersangka. Seyogyanya langkah bijak ini dapat ditiru oleh Komjen Budi Gunawan yang juga berstatus sebagai tersangka. Hal ini penting agar proses hukum segera berjalan. Presiden Joko Widodo juga dapat segera mengajukan nama calon baru untuk diangkat sebagai kapolri yang definitif.

Mencermati tanggapan masyarakat dewasa ini, akan sangat mengecewakan jika Presiden Joko Widodo tetap memutuskan untuk melantik Komjen Budi Gunawan. Apalagi kini hampir semua unsur pimpinan KPK telah dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait kasus-kasus di masa lalu. Jika semua komisioner KPK terjerat kasus hukum, maka lembaga antirasuah ini bakal lumpuh. Tim independen yang sudah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo harus segera bekerja untuk memperkuat KPK. Jangan sampai rakyat terus-menerus menjadi korban atas kepentingan para elite. \*\*\*

**Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.**